

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pangandaran merupakan kawasan yang memiliki pesona keindahan alam memukau di Jawa Barat, ternyata juga menyimpan banyak peninggalan sejarah dan kekayaan budaya.¹ Dikenal sebagai kawasan dengan sejuta potensi wisata yang terhampar luas disetiap penjuru daerahnya, Pangandaran menawarkan berbagai jenis wisata lokal nya, yakni wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Bahkan kerap kali, wisatawan domestik dan mancanegara yang mengetahui wisata Pangandaran menjadikannya sebagai salah satu tujuan favorit untuk mengisi waktu liburan. Namun, meskipun potensi yang dimiliki begitu besar dan beragam, terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pengembangannya. Potensi yang ada justru tidak dikelola secara optimal, bahkan banyak diantaranya yang belum tersentuh sama sekali. Jika hal ini tidak segera dibenahi, dapat mengancam keberlangsungan potensi yang ada dan mengancam keberadaannya di kawasan Pangandaran.

Ketakutan akan ancaman dan tidak terpeliharanya potensi yang ada, menjadi salah satu alasan yang mendukung presidium Pangandaran² untuk mendeklarasikan diri menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).³ Rasa senasib sepenanggungan ini di aspirasikan oleh 10 kecamatan di bagian Ciamis selatan yang peduli pada potensi ekonomi daerahnya, bahkan presidium dihadapan ribuan masyarakat 10 kecamatan⁴ menggelar deklarasinya di sekitar pintu masuk pantai barat Pangandaran.⁵ Hal ini didasari karena potensi alam dan budaya yang ada tidak mampu menyejahterakan masyarakat Pangandaran, bahkan relatif tertinggal dari

¹Pangandaran yang dimaksud merupakan kawasan yang sekarang berada dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Pangandaran

²Selengkapnya baca dalam tulisan Nina Herlina Lubis dkk,*Pangandaran dari Masa ke Masa*.(Pemerintah Kabupaten Pangandaran, 2016), hlm. 235-241

³Pada bagian selanjutnya Daerah Otonomi Baru hanya akan disebut DOB

⁴Sepuluh kecamatan yang dimaksud ialah Cigugur, Langkaplancar, Mangunjaya, Kalipucang, Pangandaran, Parigi, Cijulang, Cimerak dan Padaherang

⁵Nina Herlina Lubis et al., *Pangandaran Dari Masa Ke Masa* (Pemerintah Kabupaten Pangandaran, 2016).

pada masyarakat di wilayah Ciamis lainnya meskipun telah memberikan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.

Wacana pemekaran Pangandaran yang sudah ada sejak tahun 2000, dibahas kembali setelah peristiwa tsunami yang menerjang Pangandaran yang berada di kawasan pantai pada hari Senin 17 Juli 2006. Gempa yang berpusat pada kedalaman 33 KM ini disertai lima kali gempa susulan pada sore hari yang berkisar antar 5 sampai dengan 7 skala richter⁶. Bencana alam yang begitu memporakporandakan Pangandaran ini, ditangani dengan lamban hingga membuat sebagian masyarakat merasa kecewa. Infrastruktur yang sedari awal sudah mandek sangat lama di pelabuhan semakin terbengkalai, jarak yang sangat jauh ke ibu kota kabupaten serta fasilitas kesehatan yang tidak memadai, memunculkan spekulasi bahwa kebijakan yang ada tidak bisa bertindak cepat sesuai keinginan masyarakat. Korban akibat tsunami yang mengalami luka ringan, tercatat di larikan ke Puskesmas Pangandaran, Kalipucang, dan Cijulang. Sementara korban yang mengalami luka berat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tasik, Ciamis dan paling dekat ke Banjar yang berjarak +/- 90km.

Semenjak peristiwa itu, peran presidium dan panitia pembentukan DOB pun semakin memperluas jaringan pendekatan ke berbagai pejabat politik hingga berhasil dibahas pada rapat kerja pemerintah pusat dan provinsi tahun 2010 yang dipicu berdasarkan pertimbangan administratif, ekonomi dan aspirasi yang masuk⁷. Percaya diri yang cukup tinggi karena merasa sebagai lumbung pendapatan, 10 kecamatan yang tergabung pun akhirnya berhasil ditetapkan sebagai DOB bernama Kabupaten Pangandaran.⁸

Pemekaran Pangandaran tidak secara langsung membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat yang berada di wilayah yang turut serta dalam pemekaran ini. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya haruslah lebih baik

⁶Pikiran Rakyat, 18 Juli 2006

⁷Nanda Dwi A. dkk, "Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran dari Kabupaten Ciamis Tahun 2019" Universitas Siliwangi (Program Kreativitas Mahasiswa:Artikel Ilmiah), 2022

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat

sebagaimana alasan-alasan yang diutarakan para cendekiawan dalam merealisasikan pemekaran Kabupaten Pangandaran.

Penelitian ini penting untuk dikaji, mengingat pembahasan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsiah sudut pandang baru dalam menganalisis faktorpendukung dan penghambat yang dapat diajukan untuk perencanaan strategis kedepannya melalui upaya optimalisasi yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami cara yang semestinya dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah berwenang dalam melihat setiap potensi wisata budaya untuk dikembangkan.

Penelitian-penelitian yang menyinggung Pangandaran dirasa belum terlalu banyak dan menyeluruh, namun topik yang hampir serupa di daerah lain sudah ada yang mengkaji seperti skripsi yang berjudul "*Pariwisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Karawang*" oleh Entin Rahmadani, "*Pariwisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Sumedang*" oleh Dewi Adriani, dan "*Pariwisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Cianjur*" oleh Firda Eka Pertiwi. Penelitian mereka mempunyai subjek penelitian yang sama dengan memaparkan keadaan objek pada saat diteliti. Penelitian yang dilakukan juga saling menonjolkan daya tarik wisata sebagai media promosi untuk mengundang wisatawan supaya bisa berkunjung kesana. Sementara bahasan yang menjadi ciri khas dari penelitian saya terdapat pada upaya pengembangan wisata budaya yang dimiliki daerah sebagai suatu potensi oleh dua pemerintahan yang berwenang.

Tahun yang diambil merupakan sebuah komparasi pengembangan yang dilakukan yakni tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 saat masih menjadi bagian dari Kabupaten Ciamis dan tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 setelah melakukan pemekaran menjadi Kabupaten Pangandaran. Tahun 2006 dipilih sebagai waktu sebuah permasalahan muncul, yakni peristiwa bencana alam tsunami untuk menyelaraskan upaya kebijakan yang diberikan pemerintah dan argumentasi yang diterima masyarakat hingga berakhir sampai 2020 sebelum bencana alam COVID menyebar di Indonesia.

Bangkitnya Pangandaran dari keterpurukan tsunami, mendeklarasikan diri sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga pesatnya perkembangan wilayah Kabupaten Pangandaran saat ini membuat penulis tergerak hatinya untuk mengupas

ekonomi Pangandaran pada aspek wisata budayanya sebagai sebuah potensi yang dikembangkan pemerintah dan masyarakatnya pada tahun 2006 hingga 2020 sebagai landasan pengetahuan semua generasi akan wawasan daerahnya dari kajian masa lalu, sekarang hingga kebermanfaatannya untuk masa depan. Maka dari itu, melalui kajian sosial ekonomi penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejarah yang berjudul “Perkembangan Pariwisata Budaya di Pangandaran 2006-2020”. Dengan demikian, harapan penulis untuk penelitian ini ialah memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perkembangan wisata budaya karena bisa saling beririsan dan berdampak dengan aspek ekonomi lain dalam konteks yang lebih luas. Serta dapat memberikan kontribusi pada pemahaman topik yang dikaji dengan lebih baik tentang kompleksitas identitas di wilayah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Sekaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perkembangan Pariwisata Budaya di Pangandaran Tahun 2006-2020?”

Rumusan masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana gambaran umum kawasan Kabupaten Pangandaran?
2. Apa saja daya tarik wisata budaya yang ada di kawasan Pangandaran ?
3. Bagaimana tata kelola dan perkembangan pariwisata budaya di kawasan Pangandaran tahun 2006-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui data yang di dapatkan kemudian di selidiki fakta-faktanya melalui prinsip ilmiah agar dapat di interpretasikan pada sebuah narasi yang koheren. Tujuan penelitian dibagi menjadi dua⁹, yakni tujuan umum untuk mencapai tujuan penelitian secara keseluruhan dan tujuan khusus untuk menjabarkan tujuan umum dengan sifat yang lebih operasional.

⁹Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, (Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 2010) hlm.

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan perkembangan wisata di Pangandaran melalui studi komparasi era peralihan Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis. Sementara tujuan khusus dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Memaparkan gambaran umum kawasan Kabupaten Pangandaran tahun 2006-2020.
2. Menjelaskan daya tarik wisata budaya yang ada di kawasan Pangandaran.
3. Mengetahui tata kelola dan perkembangan pariwisata budaya di kawasan Pangandaran tahun 2006-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori, berkenaan dengan informasi mengenai perkembangan wisata di Pangandaran melalui studi komparasi era peralihan Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis yakni sebagai bahan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan, penelaahan kajian sejarah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pembaca dapat membangkitkan kesadaran sejarah dalam mempelajari sejarah pariwisata maupun sejarah lokal di kawasan Kabupaten Pangandaran.
2. Bagi penulis memberikan pengetahuan mengenai perkembangan pariwisata budaya di Pangandaran melalui studi komparasi era peralihan Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis.
3. Sebagai tolak ukur bagi penulis untuk mengetahui kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.

1.4.3 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan empiris kepada publik dalam mengidentifikasi pariwisata budaya yang diharapkan mengalami pengembangan signifikan pada rentang waktu 2006 hingga 2020.

1.5 Tinjauan Teoritis

1.5.1 Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan teori yang nantinya dapat dijadikan acuan maupun landasan dalam membahas masalah yang sedang diteliti sehingga dapat memecahkan masalah pada topik penelitian yang akan dikaji.

1.5.1.1 Struktural Fungsional

Keterkaitan penggunaan teori struktural fungsional yang dipinjam dari Radcliffe Brown ialah untuk menjelaskan fungsi dan peranan antar komponen yang terlibat dalam proses perkembangan pariwisata budaya di Pangandaran, yakni pemerintah, swasta, pegiat budaya dan masyarakat lokal. Data yang ditemukan kemudian dihubungkan untuk membentuk pola dan dipadukan oleh peneliti agar menjadi suatu struktur yang sistematis. Selanjutnya data akan diolah untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dan nantinya dapat disajikan dalam tulisan skripsi ini.¹⁰

Analisis interaksi antara pemerintah, swasta, pegiat budaya dan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata budaya di Pangandaran melalui pendekatan struktural fungsional akan membantu mengidentifikasi pengaruh antar komponen yang dapat berkontribusi terhadap keseluruhan sistem. Sehingga, data yang diperoleh akan mengungkap pola interaksi dan dampaknya, yang nantinya bisa menyimpulkan acuan dasar rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata budaya yang efektif dan berkelanjutan.

1.5.1.2 Pariwisata Budaya

Wisata adalah kunjungan ke suatu tempat oleh seseorang atau kelompok dalam waktu sementara. Dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 Bab 1 Pasal 1 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau aktivitas perjalanan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang dikunjungi, seperti pengembangan kawasan wisata dan promosi wisata. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, yakni industri yang mencakup layanan dan produk

¹⁰Lupton, Tom. *Social Factors Influencing Industrial Output*. Vol 56 (Apr., 1956)., pp. 55-59

wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berkaitan dengan bidang wisata, misalnya agen, restoran dan tempat menarik wisatawan. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Kemudian dijelaskan juga pada Bab 2 Pasal 3 bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata melalui peningkatan ekonomi, pelestarian budaya, pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas hidup, promosi destinasi, kolaborasi dan kerjasama; memupuk rasa cinta tanah air dalam meningkatkan persahabatan antar bangsa; memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; serta mendorong pendayagunaan produksi nasional.¹¹

Pariwisata budaya merupakan sebuah perjalanan yang dimaksudkan untuk mendapatkan apresiasi dan pengetahuan tentang budaya, warisan budaya dan hasil karya manusia. Budaya yang dimaksud ialah kekayaan zaman dulu yang digambarkan melalui situs sejarah, monument, artefak dan arsitek. Sementara warisan budaya ialah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya seperti tradisi, adat istiadat dan bahasa. Serta hasil karya manusia yang indah ini akan terbatas pada kesenian seperti teater, tari, opera dan seni lukis¹².

Relevansi teori pariwisata budaya dengan penelitian ini adalah dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang dampak pemekaran wilayah pada berbagai aspek perkembangan pariwisata budaya di Pangandaran meliputi pengembangan destinasi pariwisata budaya melalui analisis perkembangan promosi warisan budaya dan peningkatan kualitas pengalaman wisatawan; perilaku wisatawan dan segmentasi pasar khususnya yang memiliki ketertarikan pada wisata

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. [online] melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/35462/UU%20Nomor%209%20Tahun%201990.pdf>.

¹²Ardiwidjaja. *Arkeowisata : Mengembangkan Daya Tarik Pelestarian Warisan Budaya* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), hlm. 28 Sub materi Jenis Wisata Minat Khusus [online] melalui: https://www.google.co.id/books/edition/Arkeowisata_Mengembangkan_Daya_Tarik_Pel/GahcDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pariwisata+budaya&printsec=frontcover

budaya; dampak ekonomi, sosial dan budaya dalam memfasilitasi investasi dan pembangunan agar positif; serta strategi dan kebijakan yang diterapkan untuk mendukung pariwisata budaya.

1.5.2 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka diperuntukkan dalam menambah pengetahuan dan pandangan untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan, sehingga kajian pustaka yang digunakan harus memiliki keterkaitan dengan penelitian. Hal ini berguna untuk memperkuat analisis dengan membandingkan konsep dari buku-buku yang ditemukan dengan karya lain serta data yang relevan dengan penelitian ini.

Buku yang merujuk pada gambaran umum wisata budaya di kawasan Pangandaran akan menggunakan buku yang ditulis oleh Adeng, Rosyadi, Irvan Setiawan, M.Halwi Dahlan, Devy Avliani Hartanto, dan Vela Zuharni yang berjudul "*Potensi Budaya di Kabupaten Pangandaran*". Buku ini memuat penjelasan wilayah Kabupaten Pangandaran meliputi sejarah singkat, kondisi geografi, kependudukan dan arti lambang daerah, serta terdapat pula penjelasan mengenai potensi budayanya secara menyeluruh, meliputi kesenian, upacara tradisional, tabu/pantangan, makanan tradisional, pengobatan tradisional, bangunan/arsitektur, peralatan, sistem kekerabatan, daya tarik wisata, ungkapan tradisional, kerajinan, permainan tradisional dan alat transportasi. Sumber rujukan lainnya didapatkan melalui arsip pemerintah seperti peraturan bupati dan undang-undang yang membahas mengenai kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi dan pembentukan DOB Kabupaten Pangandaran.

Pertanyaan penelitian kedua terkait wisata budaya era Kabupaten Ciamis akan menggunakan tulisan yang berjudul "*Potensi Budaya di Kabupaten Pangandaran*" oleh Adeng Rosyadi, I. Setiawan, M.H. Dahlan, D.A. Hartanto dan V. Zuharni serta penelitian "*Inventarisasi Sumber Sejarah di Kabupaten Ciamis*". Penelitian ini dilakukan oleh Heru Erwantoro, Herry Wiryono, Euis Thresnawati, Nandang Rusnandar dan Suwardi Alamsyah Priarana pada tahun 2003. Penelitian ini menjelaskan mengenai objek material sejarah berupa bukti-bukti sejarah masa lampau di wilayah Kabupaten Ciamis yang memang seharusnya di inventarisasi

agar bisa dijadikan suatu pembelajaran sejarah untuk bisa diimplementasikan dalam pemilihan media, sumber dan evaluasi.

Kajian pustaka selanjutnya yang menurut penulis relevan dengan pertanyaan penelitian kedua yaitu laporan pencatatan berjudul "*Ronggeng Gunung di Kabupaten Ciamis*" yang ditulis oleh Adeng, dkk pada tahun 2013 yang memaparkan mengenai penjelasan seni ronggeng, lagu, pakaian yang digunakan, alat musik dan segala hal yang berkaitan dengan budaya seni ronggeng gunung di Kabupaten Ciamis termasuk wilayah Pangandaran saat itu.

Pertanyaan penelitian ketiga yang berkaitan dengan wisata budaya setelah kawasan Pangandaran menjadi DOB menggunakan buku "*Pangandaran dari Masa ke Masa*" yang diterbitkan pada tahun 2016 ini ditulis oleh Nina Herlina Lubis, Ety Saringendayanti, Miftahul Falah, Ayu Septiani dan Budimansyah. Tulisan dalam buku tersebut memuat sejarah terbentuknya Kabupaten Pangandaran, informasi temuan objek sejarah, serta keadaan budaya dan wisatanya saat proses penulisan dilakukan.

Terdapat juga buku "*Database Cagar Budaya di Kabupaten Pangandaran*" yang ditulis oleh Dewi Puspito Rini, Rico Fajrian, Adita Nofiandi dan Yanuar pada diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten pada tahun 2018. Isi bacaan dari buku ini membahas secara rinci keadaan dan letak objek cagar budayanya. Data yang ada meliputi situs pada masa hindu-budha, situs pada masa penjajahan, dan rumah yang memiliki nilai sejarah di Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya, majalah MANEKA sebagai jendela informasi balai pelestarian nilai budaya Jawa Barat volume 2 Nomor 1 yang terbit pada bulan Juli tahun 2020. Majalah ini memiliki sub materi *potensi budaya dan potensi wisata Kabupaten Pangandaran* yang memaparkan gambaran keadaan Pangandaran dewasa ini di area Pantai Pangandaran bagian pantai timur dan pantai barat.

Rujukan penelitian pada bab 3 dan 4 juga didapat melalui wawancara kepada para pegiat budaya di Ciamis dan Pangandaran serta pemerintah yang mumpuni untuk memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan.

1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini dilakukan terhadap sumber-sumber yang relevan dalam penelitian serta memiliki tema dan topik yang sama dengan yang akan diteliti sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti mengacu pada empat hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan pada penelitian ini.

Pertama, penelitian skripsi tentang Pariwisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Karawang oleh Entin Rahmadani pada tahun 2014 yang membahas tentang daya tarik wisata, akses dan layanan pendukung di Kabupaten Karawang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data historis-deskriptif. Penelitian Entin bertujuan untuk memaparkan visualisasi Kabupaten Karawang dengan menjelajahi tempat wisata disetiap destinasi sejarah dan budaya serta mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan dan akses pariwisata di Kabupaten Karawang. Kesenjangan penelitian Entin ialah kurangnya perbandingan dengan proyek wisata serupa di daerah lain serta eksplorasi yang terbatas tentang keberlanjutan jangka panjang dan dampaknya bagi lingkungan. Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian ini terbatas pada daya tarik pariwisata budaya yang dianalisis dan diinterpretasikan serta berfokus pada studi perbandingan.

Kedua, penelitian tentang Pariwisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Sumedang oleh Dewi Adriani pada tahun 2014 yang membahas potensi pariwisata Kabupaten Sumedang untuk pertumbuhan ekonomi melalui daya tarik wisata sejarah dan budaya dengan menggunakan metode penelitian sejarah sebagai upaya melihat kondisi dan perkembangan wisata yang ada. Penelitian Dewi bertujuan untuk menjelajahi potensi wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Sumedang, menyelidiki daya tarik wisata, tempat wisata budaya dan kuliner di Kabupaten Sumedang serta menganalisis dampak pemanfaatan pariwisata terhadap perekonomian lokal. Kesenjangan penelitian Dewi ini menyatakan bahwa Kabupaten Sumedang yang memiliki daya tarik wisata sejarah dan budaya yang potensial tidak bisa mengoptimalkan daya tarik wisata sejarah dan budayanya karena kurangnya informasi yang menyebabkan sedikitnya wisatawan yang berkunjung. Perbedaannya menjelaskan wilayah Sumedang pada masa kerajaan,

masa pengaruh VOC hingga akhir penjajahan bukan hanya gambaran umum wilayah saat ini seperti penelitian yang penelitian ini lakukan. Gambaran umum wilayah yang dibahas juga akan memaparkan profil wilayah dari aspek geografis, demografis, sosial dan ekonominya.

Ketiga, penelitian skripsi tentang Pariwisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Cianjur oleh Firda Eka Pertiwi pada tahun 2014 yang berfokus pada destinasi wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Cianjur dengan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis pariwisata masa lalu dan masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Cianjur agar bisa menjelajahi destinasi nya dan menganalisis manfaat pariwisata bagi pengembangan Kabupaten Cianjur dalam berbagai aspek. Perbedaan penelitian Firda dengan penelitian ini yaitu subjek dan objek penelitian serta metode yang digunakan. Penelitian ini berusaha memaparkan penjelasan perkembangan yang telah dilakukan dan apa yang bisa dilakukan oleh unsur *pentahelix*.

Keempat, penelitian berupa artikel ilmiah oleh Ferbiansyah Yona Alfianto dan Agus Machfud Fauzi pada tahun 2021 yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Pakuncen yang membahas persepsi masyarakat terhadap pembangunan oleh Pemerintah Surabaya, tantangan dan faktor pendukung pengelolaan pariwisata, manfaat pariwisata dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif teknik analisis data Miles dan Huberman secara interaktif serta pengambilan sampel dan triangulasi dalam mengumpulkan data yang bertujuan untuk membahas peran pemerintah dalam stabilitas, inovasi dan modernisasi nya. Kesenjangan penelitiannya ialah kurangnya kepuasan wisatawan seperti penginapan dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat karena tidak terdapat HTM (Harga Tiket Masuk) ataupun parkir sebagai upaya optimalisasi. Perbedaan penelitiannya ialah berusaha mengaplikasikan perawatan kesehatan, pertanian, dan pemantauan lingkungan dalam upaya pengembangan desa wisata terutama wisata religi, sementara penelitian ini mengungkapkan perkembangan secara umum setiap budaya yang dijadikan pariwisata dan bisa di komersialisasi oleh Pangandaran.

Penelitian terdahulu yang digunakan memang mempunyai subjek penelitian yang sama dengan memaparkan keadaan objek pada saat diteliti. Penelitian yang dilakukan juga saling menonjolkan daya tarik wisata sebagai media promosi untuk mengundang wisatawan supaya bisa berkunjung kesana berupa profil wilayah, temuan sejarah, atraksi kesenian, kerajinan, dan kuliner. Namun, metode penelitian yang dilakukan pada penelitian pertama menggunakan metode sejarah sementara penelitian yang lain menggunakan metode kualitatif dengan dua metode pengumpulan data yaitu metode sejarah dan metode deskriptif karena peneliti yang bersangkutan beranggapan bahwa penambahan metode deskriptif dapat menguatkan hasil penelitian yang dilakukan pada kajian saat ini.

Metode pertama menggunakan metode sejarah, yaitu penjelasan bagaimana dan mengapa peristiwa bisa terjadi melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis dokumen dan rekaman peninggalan masa lalu. Tahapan-tahapan metode penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sementara metode kedua adalah metode deskriptif yang digunakan saat proses pemecahan masalah dewasa ini untuk proses penjelasan, penuturan, analisa dan pengklasifikasian melalui tahapan orientasi lapangan, pengumpulan data dan seleksi data. Perbedaan yang paling menonjol pun terletak pada maksud penelitian dilakukan, yakni potensi wisata yang ada di Karawang, Sumedang dan Cianjur ingin lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan, sebagai promosi dan informasi bahwa terdapat wisata yang layak di kunjungi pada ketiga wilayah tersebut.

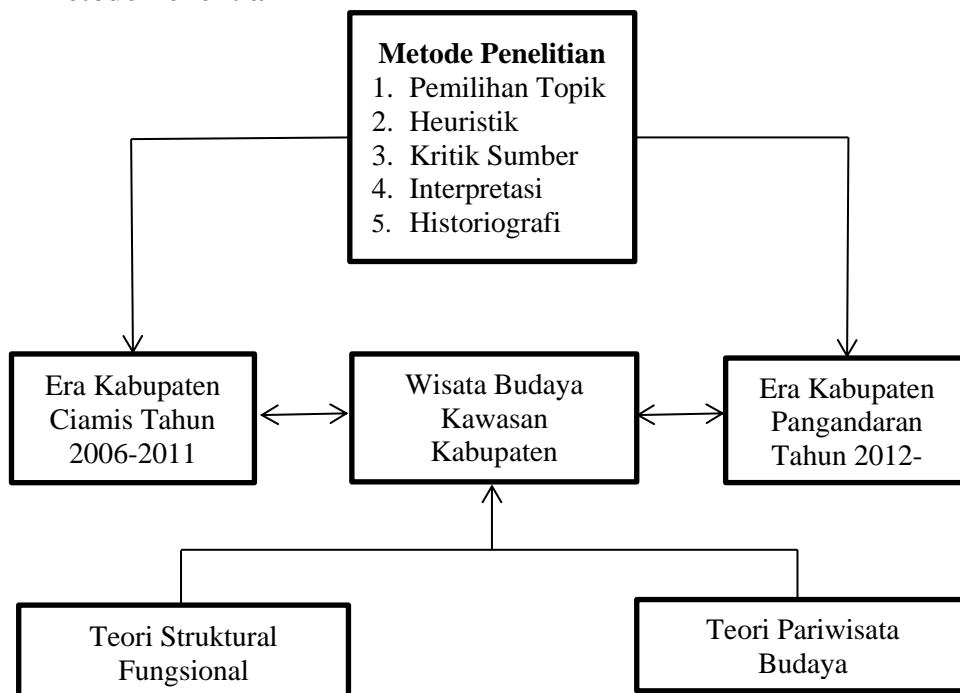
Penelitian Perkembangan Pariwisata Budaya di Pangandaran yang akan saya lakukan, selain sebagai informasi dan promosi wisata budaya juga berusaha memaparkan evaluasi pemerintah dan masyarakat terhadap potensi wisata budaya yang ada serta memberikan sumbangsih saran terhadap kemajuan perkembangan ke arah yang lebih baik.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur teoritis untuk membimbing penelitian sebagai sebuah representasi visual dari konsep utama dan hubungannya, yang dapat membantu menjelaskan arah penelitian. Konsep merupakan hal yang penting di

dalam sebuah penelitian, dengan adanya konsep, penulis dapat membatasi serta mengarahkan topik yang sedang diteliti. Kerangka konseptual digunakan untuk memberikan gambaran secara umum sehingga berbentuk kerangka berpikir yang kemudian digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep utama penelitian pariwisata budaya ini ialah wisata budaya dan perkembangannya. Konsep tersebut saling terkait, yakni pengembangan pariwisata yang dapat mempengaruhi pelestarian budaya. Hingga muncullah pernyataan yang mencakup asumsi tentang perilaku wisatawan atau dampak dari budaya bagi pariwisata di kawasan Pangandaran. Dengan teori yang mendukung dapat memberikan dasar bagi kerangka konseptual agar dapat memperkuat argumentasi dan konteks teoritis mengenai *Perkembangan Pariwisata Budaya di Pangandaran 2006-2020* melalui pendekatan yang telah dilakukan sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik (mencari dan mengumpulkan

sumber), kritik (kritik intern dan kritik ekstern), interpretasi, dan historiografi¹³. Metode ini dipakai karena peristiwa yang penulis angkat yaitu menyangkut peristiwa yang sudah terjadi untuk dipahami, dikaji, dianalisis, dikritisi, di evaluasi dan di interpretasikan pada sebuah narasi yang koheren berdasarkan keterkaitan kronologis yang berkaitan.

Penelitian ini juga akan dipaparkan melalui studi komparasi. Hal ini merupakan perbandingan yang dilakukan dengan cara melihat persamaan dan perbedaan pada data yang ditemukan untuk mendapatkan solusi dari hasil perbandingan pada objek yang diteliti.¹⁴ Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Muizah, A.Z. (Sartono Kartodirjo,1992) bahwa meskipun peristiwa sejarah tidak berulang, tetapi ada peristiwa sejarah yang memiliki kemiripan dengan peristiwa sejarah lain sehingga melalui studi komparatif dapat diketahui keunikan pola, struktur dan kecenderungannya seperti pada perkembangan wisata budaya di Kawasan Pangandaran melalui kebijakan pemerintahan era Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Untuk lebih jelasnya, pemaparan akan penulis jabarkan dalam sub bagian ini.

1.6.1 Pemilihan Topik

Tahap pertama dalam penelitian sejarah yaitu Pemilihan topik. Dalam tahap ini, penulis harus menentukan topik yang akan dikaji. Topiknya pun harus mengenai topik sejarah. Batasan waktu yang ditentukan penulis untuk penelitian ini adalah tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, kemudian batasan ruang yang diambil ialah pariwisata budaya di Kawasan Pangandaran.

Pada tahapan awal penulis akan mengulas terlebih dahulu keadaan geografis, demografis, sosial dan ekonomi di Kawasan Pangandaran tahun 2006-2020, mulai dari sisi positif dan negatifnya, lalu latar belakang pemecahan wilayah hingga terbentuk menjadi DOB untuk selanjutnya membahas mengenai daya tarik wisata yang ada dan perkembangan pariwisata yang dilakukan.

¹³Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah - Edisi Kedua* (pp. 1–2003).

¹⁴Cokro Edi Prawirodkk, *Studi Komparasi Metode Entropy dan Metode ROC Sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK*, Bandung : Kreatif Industri Nusantara. 2020 hlm. 8 [online] melalui :https://www.google.co.id/books/edition/Studi_Komparasi_Metode_Entropy_dan_Metod/TXL9DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=komparasi&pg=PA8&printsec=frontcover

1.6.2 Heuristik

Tahap kedua dalam penelitian sejarah yaitu Heuristik. Tahap heuristik ini adalah kegiatan penulis untuk mengumpulkan sumber berupa data dan informasi mengenai tema atau topik yang akan dikaji yang mana sumber ini digunakan untuk memudahkan dalam suatu penelitian¹⁵. Penulis dalam menyusun penelitian yang berjudul *Perkembangan Pariwisata Budaya di Pangandaran 2006-2020* ini dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan tema atau topik penelitian yang diangkat oleh penulis yang didapatkan dari arsip pemerintah selama rentang waktu penelitian yang berkaitan, penelitian terdahulu yang mempunyai kajian yang sama, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, majalah terbitan pemerintah, buku yang tersedia *offline* maupun *online*, kemudian sumber lainnya yang penulis dapatkan nanti di lapangan, yakni data dari dinas yang berkaitan dengan topik yang dikaji, wawancara dengan masyarakat dan tokoh yang berperan serta media masa yang relevan.

Adapun menurut sifatnya sumber sejarah terbagi menjadi tiga jenis yaitu sumber primer, sekunder dan tersier. Sumber primer merupakan sumber sejarah yang ditulis oleh orang yang menyaksikan, mendengar atau mengalami peristiwa secara langsung berupa dokumen, arsip-arsip, maupun surat kabar, dan bentuk sumbernya dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis (lisan) serta audio-visual yang sezaman dengan peristiwa yang terjadi. Sumber primer yang akan penulis gunakan ialah kebijakan-kebijakan dan arsip pemerintah Ciamis dan Pangandaran yang berkaitan dengan wisata budaya pada rentang waktu penelitian, studi dokumentasi serta wawancara dengan masyarakat yang berperan pada aspek wisata budaya Kawasan Pangandaran.

Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber sejarah yang didapatkan dari kesaksian orang yang bukan saksi mata secara langsung atau dari orang yang mendengar suatu peristiwa yang terjadi dari orang lain. Sumber sekunder juga bisa berupa buku maupun suatu penelitian. Sumber sekunder yang akan penulis gunakan tidak jauh berbeda dengan sumber primernya, akan tetapi di tulis oleh orang lain

¹⁵Kuntowijoyo, op.cit

berdasarkan pengalaman dari pihak pertama yang mengalami secara langsung serta laporan penelitian yang telah dilakukan oleh pemerintah dan mitra pemerintah. Sementara sumber tersier merupakan sumber turunan ketiga dari sumber sekunder yang tidak penulis gunakan pada penelitian ini.

Adapun sumber yang penulis gunakan, antara lain :

1. Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. *Database Peraturan JDIH BPK* (hal. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah) yang didapatkan secara online dari website resmi pemerintah yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kabupaten Pangandaran.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dari situs online JDIH
3. Arsip Pemerintah Pangandaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 dari situs online JDIH
4. Arsip Pemerintah Pangandaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 dari situs online JDIH
5. Arsip Pemerintah Pangandaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dari situs online JDIH
6. Arsip Pemerintah Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam Angka 2019 dari situs online JDIH
7. Arsip Pemerintah Pangandaran Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pangandaran. 2019 dari situs online JDIH
8. Buku Pangandaran dari Masa ke Masa yang diterbitkan pada tahun 2016. Buku ini dikaji secara offline/fisik dari Perpustakaan Kabupaten Pangandaran.
9. Buku Potensi Budaya di Kabupaten Pangandaran yang ditulis pada tahun 2018. Buku ini dikaji secara offline/fisik dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat dan merupakan laporan penelitian yang dilakukan oleh staf ahli mereka yang mumpuni di bidangnya.
10. Buku Ronggeng Gunung di Kabupaten Ciamis yang ditulis pada tahun 2013. Buku ini dikaji secara offline/fisik dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa

Barat dan merupakan laporan penelitian yang dilakukan oleh staf ahli mereka yang mumpuni di bidangnya.

11. Panduan Sang Petualang : Wisata Pesisir Ciamis Selatan yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini merupakan koleksi pribadi rekan penulis yang isinya berupa catatan perjalanan langsung penulis buku dalam menyusuri Pangandaran.
12. Artikel Ilmiah Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran dari Kabupaten Ciamis Tahun 2019. yang ditulis pada tahun 2022. Artikel ini merupakan penelitian penulis bersama rekan kelompok Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah hingga lolos SIMBELMAWA.
13. Koran Pikiran Rakyat : Tsunami Terjang Pantai Selatan Jabar, yang ditulis pada tahun 2006. Sumber ini dikaji secara offline/fisik dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Majalah MANEKA (Jendela Informasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat), yang diterbitkan pada tahun 2020. Majalah ini dikaji secara offline/fisik dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.

1.6.3 Kritik Sumber

Tahap ketiga dalam penelitian sejarah yaitu verifikasi atau kritik sumber yang bertujuan untuk memastikan apakah sumber yang dikumpulkan sesuai dan dapat digunakan sebagai sumber penelitian sejarah yang kredibel atau tidak. Setelah sumber-sumber telah dikumpulkan pada tahap heuristik dilakukan verifikasi untuk mengecek keasliannya. Tahap kritik sumber yang dilakukan, terbagi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern¹⁶.

Pada tahap kritik ekstern, tahap ini berfokus pada keaslian sumber, dengan menilai apakah sumber yang didapatkan itu asli atau turunan. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis secara fisik seperti bahan kertas, penggunaan tinta, dan warna, kemudian bentuk dokumen dari melihat penulis, penerbit dan tahun terbit.

¹⁶ibid

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran merupakan versi asli dan sah yang dapat dipastikan konsistensinya dengan periode penerbitan dan diterbitkan oleh lembaga online resmi pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 juga dapat di verifikasi kebenarannya pada situs JDIH tanpa adanya modifikasi yang tidak sah serta diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan tanggal yang tercantum. Arsip Pemerintah Pangandaran berupa laporan kinerja dan statistik juga dapat di verifikasi kebenarannya pada situs JDIH serta telah ditanyakan pada salah satu staf inspektorat Pangandaran karena sebagai salah satu narasumber pada penelitian ini, bahwa laporan yang terdapat pada website JDIH memang asli kebenarannya serta diterbitkan oleh instansi pemerintah yang relevan sesuai dengan tanggal yang disebutkan. Buku Pangandaran dari Masa ke Masa dan Laporan Penelitian yang berjudul Potensi Budaya di Kabupaten Pangandaran merupakan cetakan asli, edisi yang sah dan bukan tiruan, yakni kertas, tinta dan metode pencetakan juga dapat di konfirmasi keasliannya serta dilakukan oleh penerbit yang sah dan penulis yang ahli di bidangnya.

Kedua yaitu kritik intern, yang dilakukan setelah kritik eksternal dan berfokus pada kredibilitas sumber yang digunakan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan apakah informasi dalam sumber dapat dipercaya keasliannya atau tidak dengan membandingkan dan menelaah satu sumber yang telah di verifikasi pada tahap kritik eksternal.

Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang digunakan merupakan informasi yang sesuai dengan fakta dan relevansi hukum saat ini serta terdapat banyak kesamaan dan berulang kali disebutkan pada dokumen lain dari periode yang sama dan tidak bertentangan dengan data dan faktanya. Hal ini penting untuk memverifikasi keakuratannya dan kredibilitas informasi yang dicantumkan sehingga hasil interpretasi yang dihasilkan nantinya menjadi lebih valid dan dapat diandalkan, begitu pun dengan arsip pemerintah yang peneliti jadikan sebagai sumber penelitian yang lain. Buku Pangandaran dari Masa ke Masa dan Laporan Penelitian Potensi Budaya di Pangandaran juga kredibel isinya, yakni informasi yang dilakukan akurat karena dilakukan oleh para ahli sejarah dan ilmu lainnya

yang dapat di verifikasi juga sumber primer dan sekunder yang digunakan pada penelitian mereka.

1.6.4 Interpretasi

Tahap keempat yaitu interpretasi, yaitu penulis menetapkan hubungan antara sumber-sumber sejarah yang telah di verifikasi untuk melihat keterkaitan fakta dalam sumber-sumber sejarah yang digunakan.¹⁷ Tahap interpretasi ini dibagi menjadi tahap analisis dan tahap sintesis. Pada tahap analisis, penulis menelaah sumber-sumber untuk memahami wisata budaya di Kawasan Pangandaran dan kebijakan pemerintah yang dilakukan.

Pada undang-undang dan peraturan daerah yang digunakan pada sumber, struktur administratif dan kebijakan pembangunan di Pangandaran sudah sesuai regulasi nya serta analisis yang dilakukan pada perubahan kebijakan sudah sesuai dengan tujuan yang diusung dalam mendukung pengembangan pariwisata budaya. Arsip pemerintah yang digunakan juga telah mencerminkan data statistik berkenaan dengan dampak kebijakan yang ada terhadap masyarakat dan dapat dijadikan sebuah evaluasi pencapaian dan kendala dalam implementasi kebijakan pariwisata. Sementara pada artikel ilmiah, buku, majalah, wawancara dan media yang didapatkan telah berhasil membuat perspektif akademis tentang dampak pariwisata untuk sebuah informasi kontemporer dan reaksi publik terhadap kebijakan dan peristiwa penting yang ada di Kawasan Pangandaran seperti bencana yang terjadi pada rentang waktu penelitian.

Tahap kedua pada interpretasi sejarah ialah sintesis, hal ini merupakan proses peneliti dalam mengintegrasikan dan merangkum hasil analisis dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman holistik. Informasi yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber membentuk gambaran konsisten mengenai kebijakan pemerintah, implementasi dan dampak terhadap pariwisata budaya, yakni terdapat perbedaan perlakuan pemerintah terhadap daerah yang digunakan sebagai pariwisata dan juga tidak. Pola atau perubahan dalam kebijakan yang mempengaruhi pengembangan pariwisata juga berdasarkan daya tarik wisata pantai

¹⁷ ibid

utamanya pantai pangandaran, pantai batuhiu dan pantai batu karas sebagai wisata utama dan sektor wisata lainnya sebagai wisata kedua. Dampak kebijakan terhadap masyarakat lokal dan potensi wisata ini dapat di evaluasi dengan mengubah sugesti dikalangan masyarakat serta tujuan kebijakan pemerintah dapat tercapai ketika semua unsur pentahelix bisa berkolaborasi dan mengadakan aksi untuk kontribusi perkembangan wisata budaya di Pangandaran. Namun faktanya, terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaannya seperti banyaknya ekspektasi sewaktu Pangandaran baru pemekaran dari Ciamis tetapi justru tidak terealisasi setelah Pangandaran sepenuhnya memiliki kepala daerah dan staf nya.¹⁸

1.6.5 Historiografi

Pada tahapan historiografi merupakan tahapan terakhir, yakni proses penulisan sejarah berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan sebelumnya pada sumber.¹⁹ Penulisan historiografi harus objektif dan sistematis dengan menguraikan secara historis perkembangan pariwisata di Pangandaran Tahun 2006-2020 melalui studi komparasi era Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran serta dampaknya pada sosial ekonomi masyarakat. Pada tahap simpulan penulis akan memaparkan hasil akhir penelitian berdasarkan fakta-fakta yang penulis dapatkan dari sumber-sumber yang sudah penulis kumpulkan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul "Perkembangan Pariwisata Budaya di Pangandaran 2006-2020" terdiri dari beberapa bagian bab, dengan sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian serta tinjauan teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II hingga BAB IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab tersebut memaparkan dua hal utama yaitu temuan penelitian berdasarkan pengolahan dan analisis data dengan bentuk sesuai dengan urutan

¹⁸Selengkapnya dapat diketahui dan di analisis perbedaannya pada lampiran transkrip wawancara

¹⁹Ibid

rumusan masalah, kemudian pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah disusun. BAB II akan memaparkan mengenai gambaran umum kawasan Kabupaten Pangandaran tahun 2006-2020 dari kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi dan proses pembentukannya menjadi daerah otonomi baru. Kemudian di BAB III akan memaparkan daya tarik pariwisata budaya di Kawasan Pangandaran. Sementara BAB IV akan membahas mengenai tata kelola potensi wisata era Kabupaten Ciamis Tahun 2006-2011 dan pengembangan wisata setelah menjadi Kabupaten Pangandaran tahun 2012-2020.

BAB V berisi kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses penelitian selanjutnya dan langkah konkret para pihak yang berkaitan.